

EDISI
MARET - APRIL 2025
TAHUN XVII.



PERDA RTRW SUMBAR
DITETAPKAN
LANDASAN HUKUM
PEMANFAATAN KAWASAN



DPRD SUMBAR
BENTUK PANSUS
BAHAS LKPJ KEPALA DAERAH
TAHUN 2024



MIMBAR

DPRD SUMATERA BARAT // ASPIRATIF - RESPONSIF - INOVATIF



RANWAL RPJMD SUMBAR 2025-2029

AWALI LANGKAH WUJUDKAN SUMBAR MADANI, UNGGUL DAN BERKEADILAN



KETUA DPRD SUMBAR MUHIDI:
RAMAIKAN MASJID
BERANTAS MAKSIAH



AWALI TUGAS,
GUBERNUR SUMBAR
SAMPAIKAN VISI DAN MISI



BADAN KEHORMATAN
DPRD SUMBAR
TERIMA KUNJUNGAN DPRD SUMUT

Pengantar Redaksi

Majalah MIMBAR DPRD Provinsi Sumatera Barat Kembali hadir di tangan pembaca, membawa ragam informasi terkait pelaksanaan tugas kedewanan yang telah berjalan. Edisi kali ini Redaksi mengangkat Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai Laporan Utama, mengingat pentingnya momen proses pembahasan dan penetapan dasar-dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut untuk diketahui masyarakat luas.

Seperti diketahui, gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2025-2029 telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Setelah resmi bertugas, langkah pertama adalah menyampaikan visi dan misi ke DPRD, dilanjutkan penyampaian Ranwal RPJMD sebagai rangkuman dasar dari visi dan misi tersebut sebelum akhirnya dijabarkan ke dalam RPJMD. Dokumen tersebut merupakan dasar pijakan penyusunan program pembangunan daerah sesuai arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan.

Selain itu, beberapa informasi lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedewanan hingga berakhirnya masa persidangan kedua tahun 2024-2025 juga telah dirangkum dalam penyajian MIMBAR edisi kedua tahun 2025 ini.

Agenda tersebut antara lain penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 yang telah berhasil dituntaskan oleh DPRD melalui panitia khusus. RTRW tersebut merupakan dokumen penting bagi pemerintah daerah untuk tata Kelola wilayah sesuai potensi, kondisi dan fungsinya.

Kemudian, ada juga kegiatan sosialisasi peraturan daerah oleh seluruh anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan memahami produk hukum daerah yang telah diterbitkan, untuk bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah sebab tujuan dari pembangunan itu sendiri tentunya adalah kesejahteraan masyarakat.

Selain sosialisasi peraturan daerah, anggota DPRD juga telah berkunjung ke daerah pemilihan untuk menjalin komunikasi serta menjemput aspirasi masyarakat. Aspirasi yang berhasil dihimpun pada masa istirahat bersidang (reses) tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja dan program pembangunan daerah.

Selain itu, juga disajikan beberapa informasi terkait kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Seperti rapat kerja dan tinjauan lapangan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi program kerja di bidang anggaran. Termasuk juga menerima masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD, kunjungan kerja ke daerah lain atau ke pemerintah pusat dalam rangka pendalaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sebagai upaya meningkatkan kinerja DPRD.

Redaksi menyadari, terbatasnya ruang menjadikan tidak semua informasi dapat tersaji pada penerbitan MIMBAR kali ini. Namun, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan akses informasi ke masyarakat secara dalam jaringan melalui website untuk melengkapi kebutuhan informasi.

Tak ada gading yang tak retak, demikian juga kinerja Redaksi dalam penyajian informasi. Namun, Redaksi terus berupaya maksimal menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Redaksi sangat terbuka menerima segala bentuk kritikan, saran dan masukan yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Selamat membaca!

Salam Redaksi
Zardi Syahrir, S.H, MM



Susunan Redaksi Mimbar DPRD Prov. Sumbar

Ketua:

Drs. H. Muhidi, MM

Wakil Ketua:

Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
Muhammad Iqra Chissa, S.ST. MM
Nanda Satria, S.IP

Penanggung Jawab:

Drs. Maifrizon, M. Si

Redaktur:

Zardi Syahrir, SH, MM

Penyunting/Editor:

Dahrul Idris, S.STP, M.Si

Fotografer:

Marjoni, Pendika Saputra

Sekretaris

Deny Suryani, S.IP
Arnelly Amran, S.Sos
Taharuddin

Konsultan:

Padangmedia.com

Sekretariat Redaksi:

Humas DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 87
Padang, Sumbar

Telp. (0751) 7057591 - 7057592 -
7057593

Fax: (0751) 7059328

Website:

<https://dprd.sumbarprov.go.id>



Sekapur Sirih

Drs. Maifrizon, M.Si

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Menjelang berakhirnya masa persidangan kedua tahun 2024-2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat disibukkan dengan sejumlah agenda penting dan dipandang krusial terhadap berjalannya program pembangunan daerah. Antara lain menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), menuntaskan pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan lainnya.

Untuk menuntaskan berbagai agenda tersebut, DPRD secara umum maupun melalui alat kelengkapan DPRD yang ditugaskan untuk kepentingan tersebut memiliki jadwal yang cukup padat. Seperti pembahasan dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah, maupun melakukan konsultasi ke kementerian terkait atau kunjungan kerja ke daerah lain dalam rangka studi tiru dengan tujuan hasil dari kegiatan atau pembahasan yang dilakukan bisa maksimal, efektif dan efisien.

Selain itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima kunjungan dari DPRD daerah

lain, baik dari DPRD kabupaten dan kota di Sumatera Barat maupun DPRD dari provinsi lain. Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkonsultasi terkait agenda yang sedang dibahas oleh DPRD daerah lain tersebut dan menjadikan Sumatera Barat sebagai referensi.

Kemudian DPRD menerima kedatangan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi langsung ke Gedung Dewan. Termasuk juga menerima kedatangan lembaga atau instansi lain untuk berkoordinasi dan bersilaturahmi.

Seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga turun ke daerah pemilihan untuk melakukan sosialisasi terhadap berbagai peraturan daerah provinsi yang telah diterbitkan kepada masyarakat. Juga menjemput aspirasi masyarakat pada saat masa istirahat bersidang (reses) yang akan dihimpun untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat menyadari bahwa seluruh kegiatan kedewanan tersebut harus berjalan lancar tanpa kendala. Untuk memastikan kelancaran seluruh agenda

tersebut, kami berupaya melakukan fasilitasi yang maksimal melalui seluruh staf yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan tersebut.

Berkat dedikasi yang tinggi dari seluruh staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seluruh kegiatan kedewanan yang telah diagendakan tersebut dapat terlaksana dengan baik hingga penutupan masa persidangan kedua tahun 2024-2025 pada 29 April 2025 lalu. Meski demikian, Sekretariat DPRD akan terus meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Terima kasih kepada seluruh staf sekretariat yang telah bekerja secara maksimal dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami berharap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ke depan bisa lebih baik lagi.

Drs. Maifrizon, M.Si

Pelaksana Tugas Sekretaris
DPRD Provinsi Sumatera Barat



Sambutan

Drs. H. MUHIDI, MM

Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat

Assalamu Alaikum, Wr Wb

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat berhasil dituntaskan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Ranwal tersebut merupakan dasar dari penyusunan RPJMD sebagai pangkal simpul dari pelaksanaan program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kami menyampaikan apresiasi kepada Pansus Ranwal RPJMD yang telah berhasil merampungkan pembahasan sesuai alokasi waktu yang disediakan.

RPJMD merupakan rencana pemerintah daerah untuk jangka waktu menengah melaksanakan berbagai program pembangunan yang mengakomodir visi dan misi kepala daerah pada saat pencalonannya dan terpilih. Masa kepemimpinan Mahyeldi-Vasko Ruseimy telah dimulai pada 20 Februari 2025 lalu dengan telah dilantiknya pasangan pemenang pemilihan gubernur-wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Setelah dilantik dan menjalani retret, gubernur-wakil gubernur telah menyampaikan visi dan misi secara resmi ke DPRD sebagai tanda bahwa masa jabatannya telah dimulai.

Proses selanjutnya adalah menyampaikan Ranwal RPJMD yang juga telah dilaksanakan dan telah dituntaskan pembahasannya oleh Pansus DPRD yang ditugaskan untuk itu. Ranwal tersebut disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dalam rangka penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Nasional. Penyelarasan ini penting dilakukan agar terjadi sinergi pembangunan di daerah dengan pembangunan nasional sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal itu barangkali yang merupakan salah satu bagian penting pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa persidangan kedua tahun 2024-2025 ini, di samping tentunya banyak lagi agenda yang telah dilaksanakan baik dari fungsi anggaran, fungsi pengawasan maupun fungsi pembentukan peraturan daerah. Antara lain penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

(RTRW) tahun 2025-2045, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024, melakukan sosialisasi terhadap berbagai peraturan daerah yang sudah diterbitkan kepada masyarakat serta melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah melalui OPD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang telah berjalan dan rencana ke depan.

Selain itu, DPRD sebagai wakil rakyat juga memiliki tanggung jawab menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan kunjungan ke masyarakat pada masa istirahat bersidang (reses), seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menghimpun banyak sekali aspirasi yang berupa aspirasi terkait pembangunan fisik sarana infrastruktur, program-program pemberdayaan dan penguatan ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan dan sebagainya. Hasil kunjungan pada masa reses tersebut telah dirangkum dan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kondisi keuangan daerah.

Selanjutnya pada masa persidangan ketiga tahun 2024-2025, sejumlah agenda penting telah menunggu untuk segera dilaksanakan oleh DPRD. Antara lain lanjutan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2024, persiapan perubahan kebijakan umum anggaran APBD 2024 dan kebijakan anggaran APBD tahun 2025 serta pembahasan dokumen RPJMD 2025-2029.

Agenda tersebut harus dilakukan secara matang, mengingat hal tersebut sangat penting untuk keberlanjutan program pembangunan daerah. Kami berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menunjukkan kinerja secara maksimal dalam menuntaskan berbagai agenda tersebut dan meminta pemerintah daerah juga mempersiapkan berbagai dokumen yang akan dikupas secara Bersama guna menghasilkan program pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Wassalam

Drs. H. Muhidi, MM

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat



Ranwal RPJMD Sumbar 2025-2029

Awali Langkah Wujudkan Sumbar Madani, Unggul dan Berkeadilan

Mengawali masa tugas, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyampaian itu merupakan bagian dari proses penyusunan RPJMD yang akan memuat program-program berdasarkan visi dan misi

gubernur-wakil gubernur yang akan dilaksanakan satu periode kepemimpinan ke depan.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (9/4/2025) menyampaikan Visi Sumatera Barat 2025 – 2030 adalah Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul, dan Berkeadilan yang dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun

2025-2029 tersebut.

“Tantangan pembangunan daerah ke depan menurut Vasko cukup berat dan membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Yang harus dilakukan dengan Gerak Cepat untuk Sumbar yaitu tindakan proaktif dan responsif untuk mengatasi tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dengan langkah-langkah strategis melalui sinergi pusat dan daerah,”



kata Vasko.

Dia memaparkan, substansi dari visi Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul, dan Berkeadilan adalah Mewujudkan Masyarakat yang religius dan berperadaban maju dengan pembangunan di semua aspek berbasiskan nilai dan norma 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah', berkeadilan serta berprinsip kepada pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dia menyampaikan bahwa akan dijabarkan melalui delapan misi dengan berbagai indikator sebagai tolak ukur keberhasilannya yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.

Delapan Misi

Delapan misi tersebut adalah pertama, pendidikan merata Kesehatan berkualitas. Menurut Vasko, Pendidikan dan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan kualitas pembangunan manusia berdaya

saing. Fokus strategi utama adalah pemerataan akses, peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta penyediaan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Kemudian di bidang Kesehatan adalah pemerataan akses Kesehatan atau (Sumbar Universal Health Coverage), peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan terutama pencegahan stunting dan penyakit menular. Termasuk juga penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Masjid serta pekerja informal.

Misi kedua, lanjutnya, adalah lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang akan dilaksanakan untuk dua sasaran yaitu meningkatkan produktivitas dan cadangan pangan serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Misi ketiga menurut Vasko adalah nagari atau desa sebagai basis kemajuan. Desa atau nagari akan dijadikan sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing, dengan meningkatkan kemandirian berbasis potensi local. Kemudian meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar di tingkat desa atau nagari.

Misi keempat adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Kawasan Sumatera Bagian Barat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, dengan cara meningkatkan investasi, perdagangan dan daya saing industry daerah. Kemudian memperkuat system ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong pertumbuhan UMKM dan industry kecil menengah.

“

Tujuan dari misi tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas. Misi tersebut akan dijabarkan dalam tiga sasaran antara lain memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan perlindungan HAM dan kesetaraan gender

”



Misi selanjutnya adalah membangun infrastruktur berkeadilan dan tanggap bencana. Menurut Vasko, hal itu akan diwujudkan dengan meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air yang produktif, memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

Misi keenam adalah membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan local melalui dukungan keluarga yang berkualitas. Menurut Vasko, tujuan dari misi tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas. Misi tersebut akan dijabarkan dalam tiga sasaran antara lain memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan perlindungan HAM dan kesetaraan gender.

Misi ketujuh adalah meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Diwujudkan dalam dua sasaran yaitu meningkatkan kontribusi bidang pariwisata terhadap ekonomi daerah serta memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Misi kedelapan dari penjabaran visi Sumatera Barat ke depan adalah tata Kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif. Vasko menegaskan, akan dijabarkan dalam dua sasaran yaitu efisiensi dan transparansi tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah.

"Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi tersebut tentunya membutuhkan penajaman-penajaman serta masukan dan saran dari DPRD agar nantinya cita-cita tersebut dapat tercapai," ujarnya.

DPRD Sumbar Bentuk Pansus

Setelah penyampaian nota pengantar Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat langsung melakukan pembentukan panitia khusus (Pansus).

"Sesuai dengan agenda rapat paripurna bahwa setelah penyampaian nota Ranwal RPJMD maka DPRD langsung membentuk panitia khusus untuk membahas," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Cissa yang memimpin rapat paripurna tersebut.

Iqra Cissa menjelaskan, pembahasan Ranwal RPJMD 2025-2029 akan dilakukan oleh DPRD melalui pembentukan panitia khusus selama sepuluh hari kerja sejak disampaikan oleh kepala daerah. Hal tersebut sesuai instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2025.

"Karena memiliki ruang



lingkup yang luas maka pembahasan akan dilakukan oleh panitia khusus yang keanggotaannya berasal dari fraksi-fraksi secara proporsional," katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga sekaligus ditetapkan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan Ranwal RPJMD. Di antara yang terlibat dalam kepanitiaan khusus tersebut ada Mochklaslin dari PKS, Indra Catri dari Gerindra, Zulkenedi Said dari Golkar, Irwan Zuldani dari Nasdem, Muhayatul dari PAN, Doni Harsiva Yandra dari Demokrat dan lainnya. Dalam kesepakatannya, Pansus tersebut diketuai oleh Indra Catri.

Ketua Pansus Ranwal RPJMD Indra Catri: RPJMD Dokumen Strategis, Bukan Sekedar Formalitas

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Indra Catri Datuak Malako Nan Putih menegaskan, RPJMD merupakan dokumen strategis bagi pembangunan daerah.

"Dokumen RPJMD itu bukan sekedar formalitas, namun dokumen penting yang merupakan pedoman dalam pembangunan daerah untuk

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kata Indra Catri dalam rapat Pansus untuk pendalaman Ranwal RPJMD Sumatera Barat tersebut.

Indra Catri menambahkan, Ranwal RPJMD memuat garis-garis besar program pembangunan daerah yang akan dimasukkan ke dalam RPJMD tahun 2025-2029. Rancangan tersebut harus disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sehingga

dalam pelaksanaannya nanti program pembangunan bisa bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Prinsipnya, arah kebijakan pembangunan ke depan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, ini yang perlu dimatangkan dari awal rancangan rencana pembangunan sehingga menjadi program pemerintah daerah nantinya," ujarnya.

Dia menyebutkan, Pansus memiliki waktu sepuluh hari sejak Ranwal RPJMD disampaikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Pansus akan bekerja secara maksimal agar pembahasan dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan kesimpulan yang akan dijadikan DPRD sebagai keputusan yang memiliki keberpihakan besar kepada kesejahteraan masyarakat.

Pendalaman Ranwal RPJMD oleh Pansus DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain berkaitan dengan penguatan bidang kepariwisataan dan pertanian, percepatan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain potensi pertanian, Sumatera Barat juga harus menggali potensi besar di bidang pariwisata sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat dan pendapatan daerah. *

“

Prinsipnya, arah kebijakan pembangunan ke depan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, ini yang perlu dimatangkan dari awal rancangan rencana pembangunan sehingga menjadi program pemerintah daerah nantinya

”

Disepakati, Banyak Penyempurnaan Harus Dilakukan Dalam Penyusunan RPJMD



Setelah melalui pembahasan yang mendalam di tingkat panitia khusus, Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 disepakati dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (15/4/2025). Ranwal tersebut hendaknya segera diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi membuka rapat paripurna penetapan Ranwal RPJMD tersebut menegaskan, masih banyak perbaikan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Baik terhadap target yang menjadi baseline maupun target di tahun 2029, sumber pendanaan serta penyesuaian dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya," kata Muhidi.

Dia menegaskan, hal itu perlu dilakukan agar dokumen RPJMD betul-betul dapat dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan serta menjawab permasalahan di daerah.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang melalui panitia khusus telah menuntaskan pembahasan Ranwal RPJMD tepat waktu. Dia menyampaikan, catatan

DPRD dari hasil pembahasan akan menjadi acuan dalam penyempurnaan substansi RPJMD tersebut.

"Selanjutnya akan dilakukan konsultasi Ranwal RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri yang kami harapkan dapat berjalan lancar serta mendapat arahan dan masukan konstruktif dari pemerintah pusat," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Sumatera Barat telah mengajukan Ranwal RPJMD 2025-2029 ke DPRD setempat untuk dibahas. Sesuai instruksi Mendagri, pembahasan dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD yang memiliki waktu sepuluh hari untuk melakukan pembahasan hingga penandatanganan kesepakatan.



Perda RTRW Sumbar Ditetapkan

Landasan Hukum Pemanfaatan Kawasan

Setelah melalui proses pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus), Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyetujui untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan Ranperda RTRW tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (17/3/2025). Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyampaikan, Perda RTRW yang baru tersebut merupakan pengganti Perda nomor 12 tahun

2012. Menurutnya, pembahasan Ranperda RTRW cukup rumit karena perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah yang sudah ada.

"Ada beberapa dokumen terkait ini antara lain RPJPD tahun 2025-2045, RIPDA, RUED, PL2B, Rencana Pengembangan Kawasan Industri serta RTRW Sebagian kabupaten dan kota yang sudah ditetapkan," kata Muhidi membuka rapat paripurna tersebut.

Selain itu, lanjutnya, dalam penyusunan RTRW tahun 2025-2045 membutuhkan kajian dan perencanaan yang matang karena menyangkut kebutuhan

ruang selama 20 tahun ke depan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pertumbuhan penduduk, ekonomi dan pembangunan daerah serta tantangan terkait permasalahan tata ruang dan wilayah lainnya.

Menurut Muhidi, proses Ranperda RTRW yang dilakukan merupakan pembahasan lanjutan, di mana substansinya telah dilakukan oleh anggota DPRD periode 2019-2024. Fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhirnya sepakat untuk melanjutkan ke tingkat penetapan menjadi peraturan daerah.

"Meski demikian, fraksi-fraksi juga memberikan catatan dan rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah RTRW tersebut," katanya.

Ketua Pansus Pembahasan Ranperda RTRW DPRD Provinsi Sumatera Barat Zulkenedi Said menyampaikan, pihaknya Bersama pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam terhadap materi dan muatan Ranperda. Selain itu juga telah melakukan konsultasi ke kementerian terkait.

"Ranperda RTRW Sumatera Barat 2025-2045 bukan Perda perubahan namun merupakan Ranperda baru yang disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan RTRW yang baru ini merupakan integrasi hubungan darat dan laut. Kementerian ATR/BPN telah menyetujui 13 substansi dari Perda ini," kata Zulkenedi.

Dia menegaskan, perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Pansus bersama pemerintah daerah selama pembahasan pada prinsipnya tidak mengubah materi muatan Ranperda yang telah mendapat persetujuan substansi dari kementerian terkait. Terhadap rencana pola ruang, struktur ruang dan hal lainnya yang masih belum sesuai dengan kondisi eksisting dan keselarasan dengan dokumen lainnya akan dilakukan perbaikan pada momentum perubahan yang dapat dilakukan sekali lima tahun atau pada pelaksanaan evaluasi.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah menuntaskan pembahasan Ranperda RTRW hingga ke tahap penetapan. Menurutnya, Perda RTRW merupakan landasan hukum dalam pemanfaatan ruang dan wilayah untuk kemakmuran rakyat.

Dia menegaskan, rumusan kebijakan penataan ruang dan wilayah meliputi pengurangan



kesejangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan pedesaan. Kemudian juga untuk pengembangan ekonomi sector primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah dan sebagainya.

"Kami berharap penyelenggaraan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat terwujud dan tentunya menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak dalam melakukan pemanfaatan ruang khususnya di Provinsi Sumatera Barat," tutupnya.

Konsultasi ke Kementerian ATR/BPN

Sebelumnya, Pimpinan beserta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (5/3/2025). Konsultasi itu bertujuan untuk menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tata ruang dan wilayah (RTRW) 2025-2045 provinsi dengan pemerintah pusat dan kebijakan nasional serta memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Ketua Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Barat

Zulkenedi Said menegaskan, konsultasi tersebut merupakan langkah penting dalam memastikan RTRW yang disusun dapat mengakomodasi berbagai aspek pembangunan daerah.

"RTRW tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam perencanaan infrastruktur, mitigasi bencana, serta perlindungan lingkungan. Kami ingin memastikan RTRW ini selaras dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan," kata Zulkenedi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan, konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan RTRW yang disusun benar-benar dapat menjadi pedoman pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya menjadi dokumen formal namun harus diimplementasikan secara efektif dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat.

"Kami berharap melalui konsultasi ini, RTRW Sumatera Barat 2025-2045 dapat menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat untuk masa 20 tahun mendatang," tegas Nanda. T/P

Muhayatul Sosialisasi Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah di Pessel



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhayatul melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum (PKDPCBPM) di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Selasa (25/3/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Painan itu, Muhayatul yang juga Ketua Fraksi PAN dan anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat itu menyampaikan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perda terkait

pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya dan pengelolaan museum.

Menurutnya, Perda PKDPCBPM merupakan upaya pemerintah daerah untuk melestarikan sekaligus memajukan kebudayaan daerah, cagar budaya serta pengelolaan museum yang lebih baik lagi. "Hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah," katanya.

Lebih jauh Muhayatul menambahkan, sosialisasi Perda tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah yang sudah menjadi tradisi selama ini. Selanjutnya, kebudayaan tersebut bisa diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga terus eksis dan berkembang.

Kegiatan itu dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Yayat Wahyudi. Sebagai peserta adalah dari berbagai unsur masyarakat yang berkepentingan dalam upaya pelestarian dan perkembangan adat budaya, mulai dari ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan kalangan generasi muda. P

Sosialisasi Perda

Muhidi Ingatkan Keluarga Sebagai Pondasi Utama Pembangunan SDM

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) diawali dari lingkungan keluarga. Menurutnya, lingkungan keluarga merupakan pondasi yang

menentukan untuk terbentuknya SDM yang berkualitas.

Hal itu ditegaskan Muhidi saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat nomor 17 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga kepada masyarakat Kecamatan Padang Utara dan

Kecamatan Kuranji, Selasa (25/3/2025).

"Pembangunan SDM unggul itu dimulai dari lingkungan keluarga, ini pondasi yang sangat menentukan sebelum nantinya mereka berbaur dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan Pendidikan," kata



Muhidi.

Untuk itu, lanjutnya, peran orang tua sangat menentukan dalam membentuk karakter anak-anak sejak dini. Bagi seorang anak, keluarga merupakan "sekolah" awal yang akan mematok dasar-dasar nilai mental untuk menjadi penentu kesuksesan mereka di masa depan.

"Tentunya semua orang tua berniat memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak mereka. Pemerintah dan DPRD mendorong setiap keluarga memiliki ketahanan baik secara sosial, ekonomi dan sebagainya melalui berbagai program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh Muhidi menegaskan, Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 17 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mendorong masyarakat memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Adanya Perda tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menciptakan berbagai program pembangunan untuk tujuan meningkatkan ketahanan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Muhidi mengingatkan orang tua untuk selalu menjaga komunikasi dengan anak-anak dan tidak lengah terhadap perkembangan baik fisik maupun perkembangan

mental mereka. Anak-anak dalam masa tumbuh kembang membutuhkan perhatian dan hal itu diharapkan mereka dapatkan dari orang tua.

"Ketika orang tua tidak mampu memberikan perhatian seperti yang mereka harapkan, mereka akan mencari pelarian, bahkan banyak anak-anak yang akhirnya terjerumus ke perbuatan tidak baik, melanggar norma adat, agama serta merusak mental mereka," ingatnya.

Namun, jika komunikasi orang tua dengan anak dapat terbangun dengan baik sehingga mereka lebih terbuka, maka berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak tersebut dapat diselesaikan. Meskipun di tengah kesibukan orang tua terutama ayah dalam memenuhi kebutuhan, keharmonisan di dalam keluarga hendaknya selalu dijaga agar anak-anak tidak merasa terabaikan dan mencari pelarian di luar rumah.

Muhidi menambahkan, pemerintah daerah banyak memiliki program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan keluarga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk di bidang ekonomi. Tidak dipungkiri juga ada keluarga yang memiliki orang tua tunggal terutama kaum perempuan dan menjadi penopang hidup anak-anaknya. Pemerintah memberikan

perhatian bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga melalui berbagai program seperti pelatihan usaha dan keterampilan untuk kemandirian.

Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat Monika Nur dalam sosialisasi Perda tersebut menambahkan, pembangunan SDM sangat ditentukan oleh pola asuh orang tua. Jika pola asuh orang tua baik maka akan membawa anak-anak ke arah perkembangan yang baik, demikian juga sebaliknya. Ketahanan keluarga sangat ditentukan oleh hal tersebut.

Selanjutnya, setelah keluarga adalah lingkungan sosial. Maka dalam hal itu peran tokoh agama dan tokoh masyarakat atau di Sumatera Barat dikenal dengan istilah tungku tigo sajarangan juga memiliki peran penting untuk menjaga lingkungan kondusif untuk perkembangan anak-anak.

"Apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi ini, anak-anak bisa saja mengakses berbagai informasi tanpa mengetahui apakah itu bermanfaat atau malah menjerumuskan, maka penanaman nilai-nilai agama dan norma adat sejak awal bisa membentengi mereka sehingga tidak terseret kepada perbuatan negatif," ucapnya. T

Neldaswati Berkomitmen Mengawal Program Kesejahteraan dan Kemandirian Kaum Disabilitas



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen untuk mengawal dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, hak-hak penyandang disabilitas dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tanpa ada diskriminasi terhadap mereka.

Hal itu ditegaskan Neldaswati dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto, Kamis (27/3/2025).

Neldaswati merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari daerah pemilihan VI meliputi Kota Padangpanjang, Kabupaten Tanahdatar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya itu menegaskan, penyandang disabilitas memiliki hak untuk

mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhan mereka dalam pelayanan.

"Kami berkomitmen untuk memastikan penyandang disabilitas mendapat penghormatan, perlindungan serta perlakuan yang sama dalam segala hal, membantu mereka untuk mandiri dan sejahtera," katanya.

Dia menjelaskan, Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan wujud bahwa pemerintah hadir untuk memastikan penyandang disabilitas mendapat perlakuan dan kedudukan yang sama tanpa ada diskriminasi.

"Melalui Perda ini, pemerintah provinsi hadir untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas terpenuhi, serta menjadi payung bagi berbagai program yang bertujuan untuk membantu

kemandirian serta kesejahteraan mereka," tegasnya.

Dalam kesempatan itu ia berharap masyarakat berperan aktif dalam memastikan penyandang disabilitas telah mendapat perhatian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Dia meminta agar ikut memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, memperlakukan mereka secara manusiawi dalam kehidupan sosial serta melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

"Kami berharap melalui sosialisasi Perda ini masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mengenai peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi dalam mengawal, melindungi serta membantu penyandang disabilitas untuk mandiri dan mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan yang dijalani," katanya. P

Sutan Varel Oriano Sosialisasi Perda Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Sutan Varel Oriano menegaskan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan merupakan upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Sutan Varel saat melakukan sosialisasi Perda tersebut di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, Kamis (27/3/2025). Menurutnya, peraturan tersebut lahir sebagai bukti pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat.

"Perda ini mengatur berbagai hal yang tentunya menjadi bukti kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama petani perkebunan," katanya.

Dia menambahkan, Sumatera Barat memiliki potensi yang besar di bidang perkebunan dan sebagiannya merupakan



komoditi unggulan. Adanya Perda Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat terutama petani perkebunan.

"Fokusnya adalah bagaimana masyarakat petani bisa sejahtera, Perda ini sebagai bukti dari komitmen pemerintah untuk memastikan hal itu," lanjutnya.

Dia menegaskan, Perda tersebut antara lain mengatur antara petani, pedagang dan pengusaha agar tercipta ekosistem perdagangan komoditi yang sehat dan berdaya saing. DPRD Provinsi Sumatera Barat akan fokus dalam melakukan pengawasan terhadap berjalannya Perda tersebut agar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. P

Ali Muda Sosialisasi Perda Perhutanan Sosial di Bonjol

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Ali Muda melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, Kamis (27/3/2025). Sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna UDKP Kecamatan Bonjol itu diikuti antusias oleh

masyarakat.

Ali Muda menjelaskan, Perda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial lahir untuk mengakomodir kebutuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hutan sosial.

"Kita semua mengetahui bahwa Sebagian besar wilayah Sumatera Barat yang tentunya tidak terkecuali di Kabupaten

Pasaman terdiri dari kawasan hutan, ada yang berstatus hutan lindung, hutan produksi dan sebagainya. Perda ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi pemanfaatan hutan sosial oleh masyarakat," katanya.

Dia berharap masyarakat dapat memahami Perda tersebut sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatan hutan sosial. Melalui perda



tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan hutan namun tidak mengganggu kelestariannya.

"Apalagi di Kabupaten Pasaman memiliki hutan lindung yang luas, masyarakat tentu harus memahami aturan perundang-undangan agar pemanfaatan hutan untuk aktivitas ekoomi tidak

bersinggungan dengan masalah hukum," ulasnya.

Pada intinya, lanjut Ali Muda, keberadaan Perda Perhutanan Sosial memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber ekonomi. Namun di saat yang sama, juga sebagai upaya menjaga kelestarian hutan agar memberi perlindungan kepada lingkungan

hidup dari bencana alam.

Kepala UPTD Kehutanan Kabupaten Pasaman Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Terra Dharma dalam kesempatan itu menambahkan, konsep perhutanan social merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

"Program ini memberikan kesempatan untuk masyarakat memanfaatkan hutan untuk kegiatan ekonomi, namun dengan tetap menjaga kelestarian sehingga hutan tidak rusak dan menimbulkan bencana." kata Terra. P

Ginno Irwan Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Ginno Irwan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang, Kamis (27/3/2025).

Dalam kesempatan itu Ginno Irwan yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut menekankan, pengelolaan sampah secara terpadu memberikan banyak manfaat.

Menurutnya, sampah jika tidak dikelola secara baik

dan benar akan mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Sebaliknya, melalui berbagai pola yang dikembangkan terkait pengelolaan sampah saat ini, sampah ternyata bisa menghasilkan banyak hal.

"Dalam artian sampah tidak lagi sekedar barang tidak berguna yang berujung ke tempat pembuangan akhir namun bisa diolah Kembali untuk berbagai keperluan," terang Ginno.

Berangkat dari perkembangan tersebut, ditambah kondisi produksi sampah yang dihasilkan

setiap hari baik sampah rumah tangga maupun yang lainnya maka dicetuskanlah sebuah gagasan untuk mengelola sampah secara lebih baik. Untuk menguatkan pengelolaan sampah dimaksud maka dibuatlah sebuah peraturan daerah yaitu Perda nomor 1 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.

Tujuannya dilakukan sosialisasi terhadap Perda tersebut, menurut Ginno, agar masyarakat semakin memahami bagaimana mengelola sampah yang semakin hari volumenya semakin meningkat. Bahwa sampah masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti sumber energi, barang kerajinan hingga menjadi pupuk tanaman dan sebagainya.

"Dengan sosialisasi Perda ini masyarakat semakin memahami mengenai pengelolaan sampah dan aturan yang menaunginya sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat berbagai program yang efektif dalam mengelola sampah tersebut," ujarnya. P



DPRD Sumbar Bentuk Pansus Bahas LKPJ Kepala Daerah tahun 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024.

Pembentukan pansus tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna, Kamis (20/3/2025) usai mendengar penyampaian nota pengantar LKPJ oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, LKPJ Kepala Daerah merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Melalui LKPJ tersebut dapat diketahui sejauh mana program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan secara maksimal, termasuk di mana kelemahan dan kendala untuk dilakukan penyempurnaan pada tahun

berikutnya demi kemajuan daerah.

"Penyampaian LKPJ oleh kepala daerah ke DPRD merupakan Amanah undang-undang, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan, kelemahan dan kendala yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyempurnakan demi mencapai tujuan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," kata Muhidi.

Dia menambahkan, mengingat LKPJ memiliki cakupan yang luas dan kompleks maka DPRD membentuk panitia khusus yang beranggotakan utusan fraksi-fraksi yang ada di DPRD secara proporsional. Anggota Pansus yang dibentuk terdiri dari 14 orang yang merupakan utusan dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2024

DPRD Provinsi Sumatera Barat antara lain Irsyad Syafar dan Syofyan Hendri dari Fraksi PKS, Khairuddin Simanjuntak dan Mario Syah Johan dari Fraksi Gerindra, Zarfi Deson dan Zulfadri Darma dari Fraksi Golkar.

Kemudian dari Fraksi Nasdem diutus Abdul Rahman dan Asril, dari Fraksi PAN Indra Datuak Rajo Lelo dan Muhayatul, dari Fraksi Demokrat Doni Harsiva Yandra dan Agus Syahdeman. Selanjutnya dari Fraksi PPP ada Sawal serta dari Fraksi PDIP-PKB ada Albert Hendra Lukman.

Muhidi berharap, Pansus LKPJ dapat melakukan pembahasan secara optimal yang akan digunakan untuk Menyusun rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Rekomendasi diharapkan menjadi acuan bagi gubernur dan wakil gubernur Bersama jajaran OPD untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. P

Konsultasi Efisiensi Anggaran

DPRD Dharmasraya Kunjungi DPRD Sumbar



Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (14/3/2025). Kunjungan bertujuan untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD tahun 2025.

Kunjungan tersebut diterima oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumatera Barat H. M. Nurnas. Dalam pertemuan, dibahas langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah daerah dan DPRD untuk menyikapi permasalahan

tersebut.

Menurut Nurnas, Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut perlu disiasati dengan cermat karena sangat berpengaruh kepada tata Kelola keuangan daerah. Untuk itu koordinasi antar legislative juga sangat dibutuhkan dalam menyikapi perubahan tersebut.

"Melalui diskusi pada pertemuan ini tentunya yang diharapkan adalah bagaimana menyikapi dan menyiasati pelaksanaan Inpres yang tentu saja sangat berpengaruh kepada tata Kelola keuangan daerah ini," kata Nurnas.

Konsultasi dan koordinasi baik antar pemerintah provinsi

dengan kabupaten/ kota maupun lembaga DPRD menurut Nurnas sangat penting dilakukan untuk menyikapi perubahan yang terjadi dalam hal tata Kelola keuangan daerah saat ini. Efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025 hendaknya dilakukan secara optimal namun pembangunan daerah dan pelayanan pemerintah juga harus tetap berjalan efektif.

"Kami menyarankan agar efisiensi anggaran ini dapat berjalan dengan baik dan pelayanan pemerintah juga berjalan maksimal dengan memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Nurnas. P

DPRD Solsel Pelajari Strategi Penyusunan Propemperda ke DPRD Sumbar



Pimpinan, panitia khusus (Pansus) dan gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (14/3/2025). Kunjungan itu bertujuan untuk mendiskusikan berbagai aspek teknis dan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat MAifrizon yang

menerima kunjungan tersebut memaparkan berbagai hal teknis yang berkaitan dengan penyusunan Propemperda yang dilaksanakan di DPRD Sumatera Barat. Bagaimana agar perencanaan dan penyusunan Propemperda bisa lebih efektif dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bagaimana dalam penyusunan bisa lebih efektif, hingga kepada aplikasinya setelah dijadikan perda nanti sehingga Propemperda yang disusun sudah merupakan suatu kebutuhan serta membawa

kemajuan bagi pembangunan daerah," kata Maifrizon.

Dalam kesempatan itu Maifrizon juga berharap agar DPRD dan pemerintah kabupaten/ kota terus meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah dan DPRD provinsi. Dengan koordinasi yang baik maka akan terbangun sinergitas program pembangunan daerah yang kuat, termasuk dalam melahirkan produk hukum daerah yang bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. S

Evi Yandri Rajo Budiman Hadiri Peresmian Gedung Baru Panti Rehabilitasi ODGJ

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menghadiri peresmian Gedung baru Panti Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) di

Lolo Kasiak Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang, Jumat (21/3/2025).

Evi Yandri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dibangunnya fasilitas tersebut yang diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan dalam penanganan ODGJ.

"Kami menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung ini dan berharap dapat meningkatkan pelayanan dalam penanganan masalah ODGJ yang lebih baik lagi," kata Evi Yandri.



Dia menyampaikan, panti rehabilitasi tersebut dibutuhkan untuk penanganan ODGJ yang manusiawi. Dengan adanya

fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki kerabat yang mengalami

gangguan kejiwaan.

"ODGJ harus diperlakukan manusiawi, kami berharap tidak ada lagi praktik pemasangan anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan. Manfaatkan fasilitas yang disediakan seperti panti rehab ini untuk penanganan yang lebih baik, manusiawi dan sesuai prosedur kesehatan," katanya.

Peresmian Panti Rehabilitasi ODGJ tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mewakili gubernur. Turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan sejumlah tokoh masyarakat. T

Bahas Ranperda RIP Pariwisata

Bapemperda DPRD Batubara Konsultasi ke DPRD Sumbar



Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (24/4/2025). Kunjungan itu berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Batubara Nafiar Bersama rombongan

diterima oleh Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Dahrul Idris. Nafiar mengungkapkan, Kabupaten Batubara memiliki potensi di bidang kepariwisataan yang perlu dikembangkan secara terarah dan terencana. Untuk itu dibutuhkan sebuah peraturan daerah untuk memayungi rencana induk pengembangan pariwisata yang nantinya akan membawa kemajuan bagi daerah.

"Potensi pariwisata Kabupaten Batubara selain wisata alam juga

ada wisata sejarah, untuk pengembangannya membutuhkan strategi yang matang untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut untuk kemajuan daerah," ungkap Nafiar.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya ingin mempelajari strategi pengembangan tersebut ke DPRD Sumatera Barat karena sudah memiliki RIP Pariwisata. Dia mengatakan pengembangan bidang pariwisata di Batubara harus dioptimalkan mengingat saat ini PAD kabupaten yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Asahan sejak tahun 2007 tersebut masih rendah.

Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Dahrul Idris menerima kunjungan tersebut memaparkan berbagai hal berkaitan dengan tujuan dari kunjungan tersebut. Idris menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Batubara yang

telah berkunjung ke Sumatera Barat.

"Kami berharap hasil dari kunjungan ini dapat bermanfaat bagi pembuatan produk hukum untuk pengembangan pariwisata

di Kabupaten Batubara," kata Idris.

Dia juga berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi antar lembaga DPRD untuk peningkatan kinerja dan

bermanfaat bagi pembangunan daerah. Dia menegaskan, DPRD Provinsi Sumatera Barat terbuka menerima kunjungan dari berbagai daerah dan siap berbagi informasi yang dibutuhkan. P

Pimpinan DPRD Sumbar Terima Laporan Hasil Monev Keterbukaan Informasi 2024



Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima penyampaian laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi dari Komisi Informasi (KI), Senin (14/4/2025).

Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi didampingi tiga orang wakil ketua, Evi Yandri, Nanda Satria dan Muhammad Iqra Cissa Putra menerima kedatangan komisioner KI untuk menyampaikan laporan tersebut di ruang kerja pimpinan DPRD.

Dalam kesempatan itu Muhidi menyampaikan, keterbukaan informasi merupakan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lebih jauh, hal itu merupakan bentuk transparansi penyelenggaraan

pemerintahan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan penerapan keterbukaan informasi akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, jadi ini mestinya sudah menjadi sebuah keniscayaan," kata Muhidi.

Dia atas nama Lembaga DPRD menyampaikan apresiasi atas penyampaian laporan oleh KI Sumatera Barat tersebut. Dia berharap KI terus menunjukkan eksistensi dalam mengawal amanah UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan Sumatera Barat Informatif.

Ketua KI Sumatera Barat didampingi komisioner KI Tanti Endang Lestari, Mona Sisca dan Riswandy menyampaikan permintaan dukungan dari

DPRD dalam meningkatkan semangat keterbukaan informasi di Sumatera Barat. Menurut Musfi, sejauh ini dalam setiap pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi masih menghadapi banyak kendala dan tantangan.

"Kami masih menghadapi banyak tantangan dan kendala dalam mengawal terlaksananya keterbukaan informasi yang lebih masif, tentunya kami berharap mendapat dukungan dari DPRD," kata Musfi.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik terutama di tingkat kabupaten dan kota serta instansi vertikal juga perlu didorong untuk lebih baik lagi pelaksanaannya. Apalagi, lanjut Musfi, saat ini perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat sehingga penerapan keterbukaan harus lebih ditingkatkan lagi. P

Pansus DPRD Jambi Konsultasi ke DPRD Sumbar Terkait Pembahasan LKPJ Kepala Daerah



Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (24/4/2025). Kunjungan itu bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2024.

Wakil Ketua Pansus I LKPJ Kepala Daerah Provinsi Jambi Zulkifli Linus dalam kunjungan yang diterima Ketua Tim Pakar DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas di ruang khusus I menyebutkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun 2024.

"Untuk memaksimalkan pembahasan, kami ingin berkonsultasi ke DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kami nilai memiliki pengalaman yang baik dalam pembahasan LKPJ untuk melahirkan rekomendasi yang konstruktif untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jambi ke depan," ungkapnya.

Ketua Tim Pakar DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas memaparkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam membahas LKPJ

kepala daerah. Menurut Nurnas yang juga mantan anggota DPRD Sumatera Barat dan sering terlibat dalam pembahasan LKPJ selama masa jabatannya ini menegaskan, DPRD harus melahirkan rekomendasi yang memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah. Kemudian, DPRD juga harus mengawal apakah rekomendasi tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai fungsi pengawasan yang dimiliki.

Dia menyampaikan apresiasi kepada Pansus LKPJ DPRD Provinsi Jambi yang menjadikan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai tujuan untuk melakukan konsultasi. Dia berharap kunjungan tersebut selain untuk berbagi informasi juga hendaknya dapat memperkuat sinergitas kelembagaan antar Lembaga DPRD serta memperkuat kerja sama lebih luas lagi sebagai daerah bertetangga. P

Tutup Masa Sidang Kedua 2024-2025

DPRD Sumbar Sampaikan Hasil Reses

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan rangkuman hasil kegiatan selama masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan kedua tahun 2024-2025 kepada pemerintah provinsi. Hal itu sekaligus menandai ditutupnya

masa persidangan kedua dan dimulainya masa persidangan ketiga 2024-2025.

Penyampaian hasil reses tersebut dilakukan dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2024-2025, Selasa (29/4/2025), Ketua DPRD

Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, dalam kunjungan pada masa reses sangat banyak aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun oleh 65 anggota dewan.

"Menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ini merupakan bagian dari tanggung jawab



anggota DPRD terhadap daerah pemilihannya, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah," kata Muhidi.

Dia mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun oleh anggota DPRD tersebut untuk dimasukkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Sebab menurutnya, apa yang diperoleh oleh anggota dewan pada saat berkunjung ke daerah pemilihannya lebih mendekati kebutuhan masyarakat.

"Sehingga program dan kegiatan pembangunan daerah bisa lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dalam rapat paripurna tersebut Muhidi juga memaparkan berbagai kinerja DPRD selama masa persidangan kedua tahun 2024-2025. Baik dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah.

Dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, beberapa Ranperda yang telah berhasil ditetapkan menjadi Perda antara lain Perda Pengelolaan Sampah, Perda Kemudahan Berusaha

dan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2025-2045. Selain itu juga telah menetapkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 serta melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kemudian dari pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Bersama pemerintah daerah telah melaksanakan rapat kerja membahas hasil evaluasi APBD tahun 2025 serta tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran pada APBD Provinsi.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi dan Bapemperda, telah melakukan kegiatan terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut. Juga pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat serta membentuk Panitia Khusus pembahasan LKJP Kepala Daerah Tahun 2024.

"Dari pengawasan tersebut, cukup banyak catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan OPD terkait sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya," tambahnya.

Sejumlah Agenda Penting Sudah Menunggu

Terakhir, Muhidi mengingatkan, pada masa persidangan ketiga tahun 2024-2025, sejumlah agenda sudah menunggu untuk segera dituntaskan. Antara lain pembahasan LKJP Kepala Daerah Tahun 2024 dan LHP BPK atas LKPD Tahun 2024. Kemudian Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 serta tugas-tugas lain yang sudah direncanakan dalam Renja dan Rencana Anggaran DPRD Tahun 2025.

"Persoalannya menjadi tidak mudah karena banyaknya tugas-tugas yang harus dikerjakan beriringan dengan efisiensi dan pembatasan anggaran. Oleh sebab itu harus dilakukan pengaturan jadwal yang tepat agar semua agenda bisa tercapai," tutupnya. P

DPRD Agam Konsultasi Pembahasan LKPJ ke DPRD Sumbar



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam mengunjungi DPRD Provinsi Sumatera Barat Selasa (28/4/2025). Kunjungan tersebut adalah dalam rangka konsultasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024.

Diterima Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Dahrul Idris, pimpinan DPRD Kabupaten Agam menyampaikan, pihaknya ingin berkonsultasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi mengenai

mekanisme pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta strategi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD.

Kunjungan tersebut menurut pimpinan DPRD Kabupaten Agam, menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Melalui konsultasi tersebut diharapkan pengawasan DPRD Kabupaten Agam terhadap jalannya fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah bisa dilakukan secara lebih optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menerima kunjungan tersebut, Dahrul Idris menyampaikan bahwa DPRD

Sumatera Barat sangat terbuka untuk memberikan masukan kepada DPRD kabupaten/ kota dalam berbagai hal terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedewanan.

"Selain itu penting juga sinergi yang kuat antar Lembaga legislatif provinsi dan kabupaten/ kota untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah sehingga program tersebut bisa berjalan secara maksimal dan efisien," kata Dahrul.

Dia berharap, kunjungan DPRD kabupaten/ kota ke DPRD provinsi dapat memperkuat koordinasi antar lembaga DPRD dan antar pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas program pembangunan daerah ke depan. P



Ketua DPRD Sumbar Muhidi:

Ramaikan Masjid Berantas Maksiat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi melaksanakan safari Ramadan di Masjid Darusalam Komplek Cendana Mata Air Kecamatan Padang Selatan, Senin (10/3/2025). Dalam kesempatan itu ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran beragama dan membudayakan salat berjamaah di masjid,

Menurut Muhidi, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Generasi muda sebagai pengguna terbesar akses komunikasi dan informasi dihadapkan kepada tantangan yang tidak mudah.

"Tidak dipungkiri perkembangan teknologi informasi

memberikan pengaruh besar dalam pola hidup kita terutama generasi muda, tantangan yang dihadapi juga cukup berat karena pesatnya perkembangan media social," kata Muhidi.

Namun demikian, lanjutnya, dengan membiasakan kehidupan yang religius, semua tantangan itu bisa diatasi. Untuk itu, hendaknya selalu meramaikan masjid untuk beribadah dan belajar ilmu agama serta mengisi kehidupan sehari-hari dengan kegiatan yang positif.

"Kehidupan beragama harus tetap hidup, meramaikan masjid hendaknya menjadi budaya. Itu salah satu Langkah penting untuk menangkal pengaruh buruk yang dibawa oleh perkembangan teknologi," sarannya.

Dia menambahkan,

mengamalkan kehidupan yang religius, selalu meramaikan masjid dan mengisi keseharian dengan kegiatan positif dapat membentengi diri dan keluarga dari perbuatan maksiat. Untuk itu, hendaknya salat berjamaah dan meramaikan masjid hendaknya menjadi budaya di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan safari Ramadan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang didampingi beberapa pejabat OPD dan instansi vertikal menyerahkan bantuan masjid senilai RP50 juta. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana fasilitas rumah ibadah sehingga masyarakat semakin nyaman melaksanakan salat berjamaah. P

Beny Saswin Narun Serahkan Bantuan Pemprov untuk Masjid di Lubuk Alung



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Beny Saswin Narun menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Masjid Al Ikhlas Sungai Abang dan Masjid Raya Sangguling Kecamatan Lubuk Alung. Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan safari Ramadan anggota Fraksi Demokrat tersebut pada Kamis (20/3/2025).

Beny menjelaskan, bantuan untuk masjid tersebut merupakan program rutin pemerintah provinsi srtiap bulan Ramadan yang dialokasikan untuk menunjang pembangunan di bidang keagamaan. Diharapkan,

melalui bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi meningkatkan sarana fasilitas masjid serta untuk membiayai kegiatan keagamaan di masjid tersebut.

"Setiap tahun, Pemprov Sumatera Barat melalui program safari Ramadan seluruh pimpinan daerah termasuk pimpinan dan anggota DPRD provinsi berkunjung ke masjid-masjid yang sudah dijadwalkan untuk bertemu masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid dan kegiatan keagamaan," kata Beny.

Safari Ramadan tersebut, menurut Beny, tidak sekedar berkunjung dan menyerahkan bantuan namun juga dimanfaatkan

untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Melalui kunjungan tersebut akan terbangun diskusi antara anggota DPRD dengan masyarakat sehingga dapat diketahui program pembangunan yang dibutuhkan.

"Dengan membangun komunikasi yang baik, masyarakat akan lebih terbuka menyampaikan keluhan dan harapannya sehingga dapat diketahui program apa yang dibutuhkan, selain itu juga bisa menyampaikan pesan-pesan pembangunan serta yang tak kalah pentingnya adalah membangun jembatan hati memperkuat ukhuwah Islamiah," ujarnya. P

Ketua DPRD Sumbar Safari Ramadan di Tanjung Gadang Sijunjung



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan akan terus mendorong pemerintah provinsi untuk segera melaksanakan program unggulan gubernur-wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. Percepatan pelaksanaan program tersebut ditujukan agar masyarakat segera menikmati pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan.

Hal itu disampaikan Muhidi dalam safari Ramadan di Masjid An-Nur Jorong Koto Ranah Nagari Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, Sabtu (15/3/2025). Menurutnya, masyarakat tentunya berharap segera dapat merasakan manfaat dari program unggulan dari gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

"Salah satu program unggulan yang diusung oleh gubernur dan wakil gubernur adalah di sektor pertanian, di mana alokasi anggaran untuk

sektor ini adalah 10 persen. Masyarakat yang Sebagian besar hidup dari pertanian tentu sangat berharap program unggulan ini segera direalisasikan," kata Muhidi.

Muhidi menyebutkan, perhatian terhadap sektor pertanian merupakan langkah untuk memperkuat ketahanan pangan di mana hal tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Sebagian besar masyarakat kita hidup dari sektor pertanian, yang menjadi penyumbang terbesar PDRB. Jadi program unggulan terutama di sektor pertanian hendaknya segera direalisasikan, demikian juga program unggulan pada sektor lainnya," ucapnya.

Muhidi menambahkan, program safari Ramadan Pemprov Sumatera Barat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan puasa. Tujuannya, selain untuk bertemu dengan masyarakat juga untuk mendengar langsung aspirasi

masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Rangga Wana Putra yang ikut mendampingi kegiatan safari Ramadan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut. Menurutnya, bertemu langsung dengan masyarakat akan menjalin interaksi yang lebih baik dalam rangka mendengarkan keluhan, menyampaikan pesan pembangunan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dalam kesempatan safari Ramadan tersebut, Muhidi yang didampingi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon dan beberapa orang pejabat OPD dan instansi vertikal menyerahkan bantuan untuk Masjid An-Nur Koto Ranah sebesar Rp50 juta. Bantuan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan sarana fasilitas dan kebutuhan kegiatan keagamaan lainnya di masjid tersebut.

Gustami Hidayat Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana di Koto Tangah



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Gustami Hidayat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana untuk masyarakat Koto Tangah Kota Padang, Rabu (26/3/2025). Dia menyampaikan sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi kebencanaan.

Dalam kesempatan itu Gustami menegaskan, Provinsi Sumatera Barat tidak terkecuali Kota Padang merupakan daerah berpotensi tinggi terhadap berbagai bencana alam. Untuk itu, masyarakat harus benar-benar memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko serta mengetahui regulasi terkait kebencanaan.

"Masyarakat harus meningkatkan kesiagaan dengan memahami langkah-langkah mitigasi, penyelamatan diri atau evakuasi serta berbagai prosedur dan aturan terkait kebencanaan yang gunanya adalah untuk meminimalisir risiko Ketika terjadi bencana," kata Gustami.

Dia menegaskan, seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki potensi bencana alam. Mulai dari banjir dan longsor, gempa bumi, abrasi, tsunami dan sebagainya. Untuk itu, sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana juga akan terus dilakukan agar kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana semakin meningkat.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan peserta tersebut, Sekretaris Kecamatan Koto Tangah Bambang menyampaikan apresiasi atas

dilaksanakannya sosialisasi Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana tersebut. Dia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebencanaan sehingga meminimalisir dampak risiko korban dan kerugian yang ditimbulkan jika bencana terjadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Fajar Sukma menambahkan, sangat penting meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi kebencanaan di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian, masyarakat bisa mempersiapkan diri dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan Ketika bencana terjadi. T

Safari Ramadan di Masjid As-Sakinah Balai Gadang

Muhidi Tekankan Nilai Silaturahmi



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menekankan pentingnya nilai-nilai silaturahmi yang mampu menguatkan ukhuwwah islamiah. Masyarakat diharapkan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama dalam rangka mengharapkan pahala dan hubungan dengan Allah SWT.

Hal itu disampaikan Muhidi dalam safari Ramadan di Masjid As-Sakinah Komplek Villa Angrek I Kelurahan Aia Dingin Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Rabu (19/3/2025). Menurutnya, menjaga silaturahmi merupakan ajaran agama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah.

Dia menegaskan, menjaga silaturahmi menjadikan suasana kehidupan sosial lebih harmonis. Masyarakat bisa hidup dan berbaur di dalam lingkungan dengan tenang, rukun dan damai.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga menyampaikan tentang berbagai keutamaan kitab suci Alquran sebagai pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia. Dia berharap nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dapat diterapkan oleh umat secara totalitas sehingga terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.

Muhidi juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan, keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-

masing. Saling menghormati terutama saat menjalankan ibadah puasa dan kegiatan Ramadan. Dia juga mengajak warga untuk membiasakan diri melaksanakan salat berjamaah di masjid, tidak saja pada Waktu bulan puasa namun juga pada hari-hari yang lain.

Dalam kunjungan safari Ramadan tersebut, Muhidi menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp50 juta dan sejumlah kitab Alquran kepada pengurus Masjid As-Sakinah Balai Gadang. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan kegiatan keagamaan di masjid tersebut. P



Awali Tugas, Gubernur Sumbar Sampaikan Visi dan Misi

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama wakil gubernur, Vasko Ruseimy menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (3/3/2025). Penyampaian visi dan misi tersebut merupakan langkah awal perjalanan masa jabatan 2025-2030 seiring pelantikan oleh Presiden RI 20 Februari 2025 lalu.

Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi tersebut, Mahyeldi menyampaikan tantangan yang dihadapi daerah ke depan cukup berat dan harus dikelola dengan baik.

"Tantangan dari berbagai sektor yang menjadi prioritas, seperti pemerataan kualitas sumber daya manusia, akses Pendidikan, akses Kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Selain itu juga penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta pengembangan infrastruktur digital sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi," kata Mahyeldi.

Pasangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat lima tahun ke depan dalam visi dan misinya mewujudkan Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan mengusung tekad Gerak Cepat untuk Sumbar.

Mahyeldi menuturkan, tantangan berat lainnya yang juga dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah penyesuaian anggaran sesuai dengan UU

nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Antara lain, tahun 2027 belanja pegawai hanya dibolehkan maksimal 30 persen dari total APBD sementara belanja infrastruktur publik minimal 40 persen.

"Saat ini belanja pegawai di tingkat provinsi masih 34,21 persen sedangkan belanja infrastruktur publik baru 32,04 persen. Jadi belanja pegawai masih harus dikurangi secara bertahap dan belanja infrastruktur harus ditambah," terangnya. P

Kondisi itu, lanjutnya, juga dialami oleh pemerintah kabupaten dan kota bahkan belanja pegawai masih lebih besar dari provinsi. Sementara APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar 52,93 persen masih bergantung dari pemerintah pusat.

"Kondisi ini tentunya membuat pemerintah provinsi sulit menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah kabupaten/ kota sebab BKK tidak dihitung sebagai anggaran infrastruktur publik," ujarnya.

Untuk menghadapi berbagai tantangan itu, lanjut Mahyeldi, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang erat antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, DPRD, dan seluruh unsur terkait lainnya. Kolaborasi yang kuat dengan kebijakan yang tepat diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi sesuai yang diharapkan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi

menegaskan, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur 2025-2030 merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dia mengakui, tantangan yang dihadapi untuk membawa kemajuan Sumatera Barat bergerak menuju Indonesia Emas sangat berat.

"Target pembangunan daerah yang ditetapkan secara imperatif serta semakin berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah merupakan tantangan yang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras, inovasi dan kolaborasi agar daerah tumbuh mandiri serta mampu membiayai program pembangunan dengan pendapatan daerah sendiri,"

kata Muhidi.

Muhidi menambahkan, visi dan misi, sasaran dan program kerja yang dilaksanakan oleh gubernur bersama wakil gubernur lima tahun ke depan dalam kondisi keterbatasan membutuhkan dukungan, kerja sama dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Penyampaian visi dan misi pada rapat paripurna DPRD tersebut merupakan pidato pertama gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2025-2030. Mahyeldi-Vasko Ruseimy dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 lalu. P

Momen Idulfitri

Ketua DPRD Sumbar Sambut Masyarakat di Rumah Dinas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera

Barat Muhidi membuka pintu (Open House) untuk menerima kedatangan masyarakat yang berlebaran di rumah jabatannya, Jalan Jenderal Sudirman, Padang selama dua hari. Open house yang dilaksanakan selama dua hari pada hari pertama dan kedua lebaran Idulfitri tersebut disambut antusias oleh ribuan warga.

Muhidi menegaskan, momen Idulfitri merupakan ajang silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan, saling bermaafan dan menikmati keberkahan. Melalui momen tersebut, hubungan pemerintah dan masyarakat akan semakin harmonis sehingga memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah.

"Silaturahmi merupakan sarana penting untuk memperkuat persaudaraan sehingga terbangun sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun dan memajukan daerah," kata Muhidi, Senin (31/3/2025).

Selama dua hari open house di rumah jabatannya, Muhidi Bersama keluarga menerima



kedatangan ribuan warga yang berkunjung untuk berlebaran. Selain itu, Muhidi juga menerima kedatangan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Menurut Muhidi, open house tersebut merupakan bentuk keterbukaan dan kedekatan pemerintah daerah dan DPRD dengan masyarakat. Momen tersebut sangat bermanfaat untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi sehingga masyarakat semakin terbuka kepada anggota dewan sebagai wakil rakyat.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dan

keluarga melaksanakan Salat Idulfitri di halaman kantor gubernur Bersama Gubernur dan unsur Forkopimda. Usai Salat led, Muhidi juga menyempatkan diri bersilaturahmi ke Istana Gubernur sebagai bentuk silaturahmi serta keharmonisan hubungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

"Saling berkunjung pada momen lebaran merupakan tradisi yang bisa memperkuat silaturahmi, mewakili lembaga DPRD serta atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan Selamat Idulfitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin," tutup Muhidi. P

Wakil Ketua DPRD Sumbar Usulkan Jalan Dua Jalur di Depan Taman Budaya



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Cissa mengusulkan agar jalan di depan Taman Budaya dijadikan dua jalur. Selain mempercantik tata kota juga bermanfaat untuk peningkatan aktivitas perekonomian.

Usulan itu disampaikan Iqra saat bertemu Wali Kota Padang Fadly Amran dalam jamuan makan malam, Selasa (29/4/2025). Menurutnya, jalan satu jalur saat ini kurang mendukung aktivitas

perekonomian, sehingga banyak toko di sepanjang jalur tersebut saat ini tidak beraktivitas.

"Sebaiknya dibuat dua jalur mulai dari lampu merah Jalan Pemuda sampai ke depan Taman Budaya, tata kota menjadi semakin cantik dan aktivitas perekonomian Kembali bergairah," saran Iqra dalam pertemuan tersebut.

Iqra berpendapat, dengan pembenahan tersebut akan meningkatkan aktivitas perekonomian di kawasan itu. Trotoar dan tempat penyeberangan jalan juga harus

dibenahi.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik usulan politisi Partai Golkar daerah pemilihan Kota Padang tersebut. Menurutnya, penataan kawasan perkotaan perlu dilakukan termasuk mempertimbangkan pembangunan jalan dua jalur di depan Taman Budaya tersebut.

"Usulan ini sangat bagus karena tujuannya adalah untuk penataan kawasan menjadi lebih indah, nyaman dan mendukung aktivitas masyarakat untuk berbagai kepentingan," kata Fadly. P

Halal Bi Halal DPRD Sumbar

Muhidi: Jaga Semangat Kebersamaan!



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengajak seluruh anggota DPRD dan Sekretariat DPRD untuk terus membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas. Kemudian, semangat kebersamaan juga harus terus dijaga agar tercipta soliditas antar anggota DPRD dalam menjalankan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hal itu disampaikan Muhidi dalam halal bi halal DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (14/4/2025). Muhidi

menekankan, sinergitas dan soliditas sangat penting untuk meningkatkan kinerja ke depan.

"Sinergi dan soliditas harus terbangun demi meningkatkan kinerja ke depan, semangat kebersamaan harus terus dipelihara agar menciptakan keharmonisan Lembaga dalam menjalankan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah," tegas Muhidi.

Halal Bi Halal anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut digelar di ruang sidang utama. Muhidi dalam

kesempatan itu menambahkan, momen Idul Fitri hendaknya dijadikan sebagai waktu dan kesempatan untuk saling memaafkan dan memperkuat silaturahmi.

Acara halal bi halal tersebut ditutup dengan makan bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD bersama seluruh jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Muhidi berharap momen tersebut semakin memperkuat kebersamaan yang selama ini telah terbangun baik antar sesama anggota DPRD maupun dengan Sekretariat DPRD. P



Badan Kehormatan DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Sumut

Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Bakri Bakar menerima kunjungan BK DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (17/3/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait kinerja BK sebagai Alat Kelengkapan DPRD (AKD) di daerah masing-masing.

Ketua BK DPRD Sumatera Utara Pantur Banjarnahor didampingi Wakil Ketua, Abdul Khair dalam kesempatan itu mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kinerja dan peran Badan Kehormatan, memperkuat fungsinya untuk menjaga citra DPRD secara kelembagaan.

"Melalui kunjungan ini kami berharap mendapat informasi dan pengalaman yang bisa dijadikan acuan guna meningkatkan kinerja Badan

Kehormatan dalam menjaga citra Lembaga DPRD secara professional," ungkapnya.

Selain itu, tidak kalah pentingnya menurut Pantur adalah bahwa kunjungan tersebut sangat penting dalam memperkuat sinergi lembaga DPRD antar daerah. Diharapkan dengan kunjungan yang dilakukan semakin mempererat hubungan dan meningkatkan kerja sama antar daerah dalam memacu pembangunan.

Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat Bakri Bakar dalam kesempatan itu menerangkan, menyampaikan apresiasi kepada BK DPRD Sumatera Utara yang telah berkunjung ke Sumatera Barat. Senada, Bakri Bakar mengakui kunjungan tidak saja mencakup bidang tugas namun lebih jauh adalah memperkuat hubungan kelembagaan DPRD antar daerah.

Menurut Bakri, BK merupakan AKD yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga marwah Lembaga DPRD. BK memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan kode etik dan perilaku anggota DPRD.

"Melalui peran BK, akan tercipta kinerja anggota DPRD yang berintegritas dan profesional yang tentunya akan meningkatkan citra DPRD sebagai Lembaga serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah," ujarnya.

Pertemuan BK DPRD Sumatera Barat dan DPRD Sumatera Utara tersebut diisi dengan diskusi terkait tugas dan fungsi dalam pengawasan tata tertib dan kode etik anggota DPRD, tata cara beracara dan sebagainya. Pertemuan berlangsung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumatera Barat. P

Jalan Tembus Bayang-Alahan Panjang Direncanakan Tuntas Tahun Ini



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra menegaskan, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tembus Bayang-Alahan Panjang bisa tuntas tahun ini (2025, red).

"Tahun ini Pemprov Sumatera Barat kembali mengalokasikan Rp38 miliar yang diharapkan bisa menuntaskan pembangunan jalan tembus Kabupaten Pesisir Selatan ke Kabupaten Solok tersebut," kata Doni.

Dia menegaskan, pembangunan jalan Bayang-Alahan Panjang merupakan salah satu prioritas Pemprov Sumatera Barat dalam peningkatan sarana infrastruktur.

DPRD khususnya Komisi IV akan terus mendorong pembangunan fisik dapat berjalan maksimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dengan tuntasnya pembangunan jalan tembus dari Kabupaten Pesisir Selatan ke Kabupaten Solok dan Solok Selatan tersebut akan memberikan dampak sangat besar bagi perekonomian masyarakat terutama memperpendek alur distribusi komoditi pangan baik hasil pertanian maupun perikanan," ujarnya dalam peninjauan jalan dimaksud, Sabtu (19/4/2025).

Doni menegaskan, konektivitas antar daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain jalan tembus

Pesisir Selatan - Solok dan Solok Selatan, juga tengah diperjuangkan penyelesaian pembangunan Jalan Abai Sangir (Solok Selatan) ke Sungai Dareh (Dharmasraya) sepanjang lebih kurang 74 kilometer. Selain itu, lanjutnya, juga akan diprioritaskan akses jalan tembus Kabupaten Limapuluh Kota ke Kabupaten Pasaman.

"Jadi kami berharap nantinya seluruh daerah terkoneksi dengan infrastruktur yang memadai sehingga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa sehingga tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," tutupnya. P

Komisi I DPRD Sumbar Tinjau Penerapan SPBE



Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meninjau penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Padangpanjang, Selasa (18/3/2025). Beberapa Waktu sebelumnya, juga telah dilakukan kunjungan ke beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan. Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi I, Sawal didampingi beberapa anggota Komisi I antara lain Zuldafri Darma, Indra Catri, Masrisal, Aida dan Abdul Rahman.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Sawal mengungkapkan, tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk meninjau bagai mana implementasi dari SPBE untuk

dijadikan bahan kajian untuk diterapkan di tingkat provinsi.

"Melalui SPBE ini akan terjadi konektivitas antar seluruh OPD pemerintah daerah, jadi (kunjungan) ini adalah dalam rangka pengayaan referensi dalam penerapan SPBE di tingkat pemerintah provinsi," kata Sawal dalam kunjungan ke Kota Padangpanjang, Selasa (18/3/2025).

Dalam kunjungan yang diteria Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padangpanjang Ampera Salim tersebut, Sawal menyebutkan, penerapan SPBE di Kota Padangpanjang cukup baik. Tentunya akan menjadi referensi bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi dalam penerapan SPBE

yang lebih baik lagi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padangpanjang Ampera Salim menerima kunjungan tersebut menyampaikan, penerapan SPBE merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan digitalisasi sistem pemerintahan daerah. Dia menyebutkan, indeks SPBE Kota Padangpanjang mencapai 3,16 berkat komitmen yang kuat dalam meningkatkan pelayanan public dari sistem manual ke digitalisasi.

"Meskipun demikian, kami akan terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE ini karena tentu juga masih ada kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan selama ini meskipun sudah mampu mencapai indeks yang baik," ungkapnya. P

Bamus DPRD Limapuluh Kota Konsultasi Penyusunan Renja ke DPRD Sumbar



Anggota Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muzli M Nur menerima kunjungan Bamus DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di Gedung DPRD, Selasa (22/4/2025). Kunjungan tersebut adalah dalam rangka konsultasi terkait mekanisme penyusunan rencana kerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan itu pimpinan Bamus DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Erman Mawardi menyampaikan, Bamus memiliki tugas salah satunya adalah menyusun rencana kerja DPRD serta mengagendakan jadwal kegiatan dan rapat-rapat.

"Penyusunan rencana kerja serta penjadwalan agenda ini merupakan instrument penting bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien," kata Erman

Mawardi.

Dia menyebutkan, kunjungan yang dilakukan adalah dalam rangka konsultasi untuk memperkuat kinerja Bamus sebagai alat kelengkapan DPRD yang bertanggung jawab dalam memaksimalkan kinerja DPRD melalui penyusunan rencana kerja dan mengefektifkan jadwal kegiatan. Rencana kerja yang disusun harus seiring dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga bisa sejalan dalam pelaksanaannya.

"Kami berharap melalui kunjungan ini mendapat masukan dan saran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Bamus DPRD Kabupaten Limapuluh Kota ke depan," ujarnya.

Anggota Bamus DPRD Provinsi Sumatera Barat Muzli M Nur menerima kunjungan tersebut mengakui, Bamus DPRD merupakan AKD yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk itu, membutuhkan

sinergi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah sehingga rencana kerja serta agenda yang disusun bisa terlaksana secara optimal.

"Strategi penyusunan rencana kerja dan agenda kedewanan adalah melalui sinergi dan koordinasi yang baik antar AKD serta terlebih lagi dengan pemerintah daerah sehingga dapat berjalan secara maksimal untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif," kata Muzli.

Kunjungan tersebut diisi dengan diskusi dan saling berbagi informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan secara umum dan bidang tugas Bamus DPRD secara khusus. Diharapkan, diskusi tersebut semakin meningkatkan kinerja Lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta membangun koordinasi yang lebih kuat lagi antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota. S



Ketua DPRD Sumbar Tegaskan RPJMD Harus Pro Rakyat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyampaikan pihaknya saat ini sedang menunggu penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dari pemerintah daerah. Dia menegaskan, RPJMD tersebut harus benar-benar pro rakyat sehingga program pembangunan daerah yang direncanakan memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Muhidi saat bersafari Ramadan di Masjid Al-Hidayah Komplek PJKA Sawahan Kota Padang, Selasa (18/3/2025). Menurutnya, RPJMD merupakan pedoman pemerintah

daerah dalam menyusun program pembangunan memuat rencana, pelaksanaan, sasaran dan arah kebijakan yang akan dibiayai oleh anggaran daerah.

"Ini sedang ditunggu oleh DPRD, setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik pada Februari 2025 lalu oleh Presiden. DPRD akan memastikan bahwa RPJMD tersebut akan memberikan dampak positif lebih besar kepada masyarakat," katanya.

Dia menyampaikan harapan bahwa muatan RPJMD tersebut hendaknya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Demikian juga nantinya dalam pelaksanaan harus menjadi pedoman setelah ditetapkan sebagai acuan pembangunan daerah lima tahun

ke depan. Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan peran aktif dalam pembangunan daerah.

"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan pembangunan, peran aktif masyarakat juga memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilannya," tegasnya.

Dalam safari Ramadan tersebut, Muhidi menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa uang sebesar Rp50 juta dan 10 mushaf Alquran. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang pembangunan sarana fasilitas ibadah serta kegiatan keagamaan di masjid tersebut. P

Usai Lebaran, Muhidi Minta Pelayanan Publik Kembali Berjalan Maksimal



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengingatkan usai libur lebaran pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah harus kembali berjalan secara maksimal. Jeda selama liburan jangan sampai membuat badan publik melemah sehingga memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Usai libur lebaran, seluruh instansi pemerintah harus langsung bekerja secara profesional, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat

menjadi terbengkalai," tegasnya, Senin (7/4/2025).

Dia menegaskan, pelayanan publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Libur lebaran hendaknya menjadi penyegar bagi aparatur pemerintah sehingga Kembali bersemangat Ketika masuk kerja.

"Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah, setelah liburan mestinya setiap aparatur pemerintah sudah Kembali bersemangat dan memberikan pelayanan secara maksimal,"

ulasnya.

Dia berharap, suasana santai saat liburan tidak terbawa Ketika sudah kembali bekerja sebab pelayanan maksimal kepada masyarakat merupakan bukti kehadiran pemerintah. Seluruh aparatur pemerintah hendaknya kembali bertugas secara profesional dan diharapkan juga terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Dia menyampaikan apresiasi kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) dan instansi vertikal yang telah mempersiapkan diri untuk memulai pelaksanaan tugas pelayanan. Dia berharap seluruh instansi memperkuat integritas dan etos kerja serta mengajak seluruh aparatur untuk bekerja dengan hati dan ikhlas melayani masyarakat.

Muhidi juga meminta pemerintah daerah beserta seluruh OPD untuk menjadikan hari pertama kerja sebagai momen evaluasi. Berbagai hal yang selama ini dirasa masih kurang atau lemah diharapkan bisa lebih ditingkatkan sehingga tugas pemerintah dalam melayani masyarakat benar-benar terlaksana secara optimal.

"DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang juga didukung oleh fungsi DPRD dalam penganggaran untuk memastikan tugas pemerintah daerah telah berjalan secara optimal dalam melayani masyarakat," tutupnya. S

Evi Yandri Minta IPSI Jadi Ujung Tombak Pelestarian Silat Tradisional Minang



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman meminta Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Sumatera Barat menjadi ujung tombak dalam pelestarian silat tradisional Minang. Menurutnya, silat tradisional merupakan salah satu asset budaya yang harus dirawat dan berkembang.

Hal itu disampaikan Evi Yandri dalam pertemuan silaturahmi dan konsolidasi pengurus cabang IPSI se-Sumatera Barat di Padang, Senin (14/4/2025). Dia menegaskan, silat tradisional Minang sebagai aset budaya harus mendapat perhatian serius karena perkembangannya terlihat mengalami pasang urut beberapa tahun terakhir.

"Kami melihat silat tradisional

Minang semakin tergerus oleh perkembangan budaya luar dan teknologi, ini harus menjadi perhatian khusus dan berharap IPSI bisa menjadi ujung tombak untuk membangkitkannya Kembali," kata Evi Yandri.

Konsolidasi Pengcab IPSI se-Sumatera Barat itu dilakukan dalam rangka menentukan kepemimpinan IPSI Sumatera Barat periode ke depan. Evi Yandri berharap seluruh Pengcab IPSI memiliki komitmen yang sama dalam menentukan kepemimpinan demi kemajuan cabang olahraga seni bela diri tersebut ke depan.

"Kami berharap seluruh pengurus cabang dapat melihat potensi kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa kemajuan kepada IPSI dan terhadap perkembangan olahraga seni bela diri tertua

tersebut," harapnya.

Dalam konsolidasi tersebut mencuat nama wakil gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy yang diharapkan oleh pengcab IPSI untuk memimpin Pengprov IPSI Sumatera Barat. Terkait dukungan tersebut Evi Yandri melihat sisi positif wakil gubernur tersebut yang berkomitmen dalam pelestarian adat budaya Minangkabau yang tentunya salah satunya adalah silat tradisional.

Menurutnya, Vasko telah menggagas program pelestarian silat tradisional di lingkungan SMA dan SMK melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan memberikan nilai tambah terhadap upaya pengembangan dan pelestarian budaya seni bela diri tersebut. Dia juga telah menginisiasi penggunaan Bahasa Minang di Bandara Internasional Minangkabau.

"Semua keputusan tentu ada di tangan para pengurus cabang dan seluruh komponen yang memiliki hak suara namun saya melihat positif sosok Vasko sebagai tokoh muda yang energik telah menunjukkan komitmennya dalam pelestarian adat budaya Minangkabau termasuk pencak silat tradisional," ujarnya.

Dalam konsolidasi tersebut, selain membahas sosok kepemimpinan IPSI Sumatera Barat periode mendatang, juga dibahas upaya penguatan sinergi dan soliditas organisasi IPSI. Selain itu juga membahas upaya memperkokoh eksistensi silat tradisional Minang sebagai salah satu warisan budaya daerah yang harus dilestarikan. S

Dalami Pembahasan Komisi-Komisi, Pansus LKPJ Mulai Bekerja

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan pembahasan. Diketahui oleh Abdul Rahman dari Fraksi Nasdem, Pansus akan bekerja secara maksimal diawali dengan mendalami pembahasan yang sudah dilakukan oleh komisi-komisi.

"Mengawali tugas Pansus, kami melakukan rapat Bersama pimpinan DPRD dan pimpinan komisi dan mengumpulkan hasil pembahasan di tingkat komisi untuk didalami," kata Abdul Rahman, Rabu (16/4/2025).

Dia menerangkan, hasil pembahasan di tingkat komisi akan menjadi dasar bagi Pansus untuk mendalami kinerja kepala daerah tahun 2024 dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan daerah. Pihaknya akan mendalami lebih lanjut dengan mengundang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait serta melakukan tinjauan lapangan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan.

"Tidak saja soal pelaksanaannya, namun kami juga akan menilai sejauh mana program tersebut telah memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat," katanya didampingi Wakil Ketua Pansus Agus Syahdeman dan Sekretaris Pansus, Daswanto.

DPRD sebagai representasi



masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan visi dan misi pembangunan. Untuk itu, Pansus akan fokus kepada capaian kinerja dan dampak pembangunan lintas sektor terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 DPRD Provinsi Sumatera Barat dibentuk setelah gubernur menyampaikan nota pengantar LKPJ tersebut dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (20/3/2025). Pembentukan Pansus dilakukan karena luasnya cakupan pembahasan LKPJ, dengan keanggotaan Pansus terdiri dari

perwakilan fraksi-fraksi yang ditempatkan secara proporsional.

Sebanyak 14 orang utusan fraksi-fraksi menjadi anggota Pansus. Selain Abdul Rahman (Fraksi Nasdem) sebagai ketua, Agus Syahdeman (Demokrat) sebagai wakil ketua dan Daswanto (PAN) sebagai sekretaris, anggota Pansus antara lain ada Irsyad Syafar dan Syofyan Hendri (PKS), Khairudin Simanjuntak dan Mario Syah Johan (Gerindra), Zarfi Deson dan Zulfadri Darma (Golkar), Asril (Nasdem), Indra Dt Rajo Lelo dan Muhyatul (PAN), Doni Harsiva Yandra (Demokrat), Sawal Dt Putih (PPP) serta Albert Hendra Lukman (Fraksi Gabungan PKB-PDIP). T

DPRD Sumbar Dorong Sinergi Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Daerah



Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten/ kota sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong sinergitas pembangunan daerah. Program dan kegiatan provinsi dan kabupaten/ kota hendaknya sinkron sehingga pembangunan bisa dilaksanakan secara efektif.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi saat melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Nurul Hikmah Tampuniak Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Sabtu (8/3/2025).

"Koordinasi, kebersamaan adalah kunci keberhasilan dari program pembangunan daerah. Pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten dan kota, seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah," kata Muhidi.

Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik atau infrastruktur, namun juga dalam pemberdayaan untuk penguatan ekonomi masyarakat. Menurut Muhidi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah.

"Sektor UMKM ini harus mendapat perhatian karena menyerap banyak tenaga kerja, perlu mendapat dukungan agar memiliki daya saing yang kuat serta berkembang secara maksimal," ujarnya.

Muhidi menambahkan, program pembangunan daerah mencakup segala aspek yang pada intinya bertujuan

untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tidak saja di bidang infrastruktur, pembangunan juga mencakup bidang ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, agama, social, budaya dan sebagainya.

"Agar tujuan dari pembangunan tersebut dapat dicapai tentunya kerja sama yang baik antar pemerintah daerah serta dukungan dari masyarakat sangat penting," lanjutnya.

Dalam kesempatan Safari Ramadan tersebut, Muhidi yang didampingi beberapa pimpinan OPD Pemprov dan pimpinan instansi vertikal juga didampingi Bupati Pasaman Sabar AS menyampaikan bantuan dari Pemprov Sumatera Barat untuk bantuan pembangunan Masjid Nurul Hikmah sebesar Rp50 juta. Selain itu juga diserahkan bantuan sebanyak 20 Alquran. P



Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Tolak RUU TNI

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (20/3/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang sedang dibahas di DPR RI.

Koalisi Masyarakat Sipil tersebut menilai, RUU TNI tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai reformasi. Kembalinya dwifungsi ABRI/ TNI melalui undang-undang yang rencananya disahkan hari ini oleh DPR RI dikhawatirkan akan mencederai reformasi.

Kedatangan koalisi masyarakat tersebut disambut dua orang Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Muhammad Iqra Cissa Putra dan Nanda Satria. Iqra Cissa menyampaikan sesuai kewenangan yang dimiliki, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

"Sebagai wakil rakyat, melalui kewenangan yang dimiliki oleh DPRD, kami akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi masyarakat di daerah karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat," kata Iqra.

Baik Iqra maupun Nanda Satria menyatakan siap

bersama di garis perjuangan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi. Karena aspirasi yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya tentu akan membawa suara tersebut kepada pemerintah pusat dan jaringan politik yang ada di Senayan.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari unsur masyarakat sipil dan mahasiswa lintas perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Mereka mengawali aksi unjuk rasa di persimpangan jalan depan Gedung DPRD Sumatera Barat sekitar pukul 11.00 Wib. Aksi berjalan damai, setelah menyampaikan aspirasi pengunjung rasa membubarkan diri dengan tertib. P

Kritisi Sejumlah Kebijakan Pemerintah KAMMI Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD Sumbar



Kelompok mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (29/4/2025). Aksi itu menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi rakyat.

Koordinator aksi unjuk rasa dari KAMMI Sumatera Barat dalam aksi itu menyampaikan, program yang dinilai tidak efektif untuk menjawab permasalahan rakyat adalah program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai, program tersebut tidak menyentuh akar permasalahan untuk mengentaskan kemiskinan dan kemajuan Pendidikan.

"Program makan bergizi gratis ini bukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan dan

memajukan pendidikan," kata Koordinator Aksi KAMMI dalam aksi yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria tersebut.

Selain menyoroti Program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait UU TNI yang baru disahkan. Mahasiswa menilai UU TNI tersebut berpotensi melemahkan demokrasi dan menjadi celah bagi militer dalam urusan urusan sipil. Mahasiswa juga menuntut evaluasi atas kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto setelah 150 hari melaksanakan tugas sebagai kepala negara.

Menyambut kedatangan dan aspirasi mahasiswa tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria menyampaikan, DPRD sangat

terbuka dan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa.

"Karena apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa hari ini adalah berkaitan dengan pemerintah pusat maka aspirasi ini akan ditindaklanjuti oleh DPRD untuk disampaikan ke pemerintah pusat sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai aspirasi masyarakat di daerah," kata Nanda.

Setelah menyuarakan aspirasi dan berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Mahasiswa meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. S